



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2019, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah saudara kandung Pemohon II di Losung Batu Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 36 tahun

Hal. 1 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama; XXX dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. SAKSI NIKAH dan saksi 2. SAKSI NIKAH dengan mahar berupa Uang Tunai Rp. 1.000.000;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa dari dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebelumnya telah dikarunia 2 orang anak, yang bernama:

1. XXX (Laki-laki);
2. XXX (Perempuan);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pulak para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan alasan Belum diurus, Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 November 2019;

8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2019 di Losung Batu Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon I diubah sehingga dibaca **Pemohon I** dan nama Pemohon II diubah sehingga dibaca **Pemohon II**;
- Bahwa pada posita angka 1 tertulis "... di Losung Batu Kabupaten Tapanuli Selatan", diubah sehingga dibaca "... Kec. Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara";
- Bahwa pada posita angka 2 tertulis, "... dengan wali nikah Pemohon II bernama: XXX dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. SAKSI NIKAH dan saksi 2. SAKSI NIKAH...", diubah sehingga dibaca "... dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Muall Nauli Sitompul, yang diwakilkan kepada XXX dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

Hal. 3 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. SAKSI NIKAH dan saksi 2. Ahmad Kasim Lubis ...”;

- Bahwa dahulu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0039/AC/2017/PA.Pdn., tanggal 06 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pandan. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi sebagai sepupu Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 November 2019, di Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Mual Nauli Sitompul, yang diwakilkan kepada saksi, karena abang Pemohon II tersebut tidak setuju dengan pernikahan tersebut, sehingga menyerahkannya kepada saksi untuk mengurusnya;

- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah adalah Saksi nikah dan Ahmad Kasim Lubis, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;

Hal. 4 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dahulu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pernikahan para Pemohon yang pertama sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, sehingga terlarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkannya keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para pemohon belum tercatat sehingga tidak mempunyai akta nikah dan maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

2. **Saksi Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 November 2019, di Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Mual Nauli Sitompul, yang diwakilkan kepada saksi, karena abang Pemohon II tersebut tidak setuju dengan pernikahan tersebut, sehingga menyerahkan kepada XXX untuk mengurusnya;

Hal. 5 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah adalah Saksi nikah dan Ahmad Kasim Lubis, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dahulu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pernikahan para Pemohon yang pertama sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, sehingga terlarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkannya keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para pemohon belum tercatat sehingga tidak mempunyai akta nikah dan maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaan dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan

Hal. 6 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon adalah untuk kepastian Hukum pernikahan para Pemohon dan mengurus kepentingan Hukum lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 154 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2019 menurut tatacara agama Islam di Kec. Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat (Bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah sebagaimana dalam duduk perkara, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2019 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kec. Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Mual Nauli Sitompul, yang diwakilkan kepada XXX;
- Bahwa saksi nikah adalah Saksi nikah dan Ahmad Kasim Lubis, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa dahulu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun telah resmi bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang memperlmasalahakan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorngpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab

Hal. 9 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و
شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, maka kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan

Hal. 10 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2019, di Kec. Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: RP	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

Terbilang: tiga ratus enam ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pdn